

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

Dalam rangka memudahkan para petani, khususnya di Jawa Tengah, untuk menebus pupuk bersubsidi secara lebih terstruktur dan terkendali, dicanangkan sebuah program bernama kartu tani. Program ini mulai dilaksanakan secara luas di seluruh wilayah Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Pemalang, setelah Ganjar Pranowo resmi menjabat sebagai Gubernur. Di Kabupaten Pemalang itu sendiri, kebijakan ini mensyaratkan petani untuk memenuhi ketentuan administratif, seperti menyerahkan fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan SPPT kepemilikan lahan. Namun, kebijakan ini secara tegas mengecualikan petani penggarap yang tidak memiliki lahan dari pengajuan kartu tani. Meskipun tujuan awal kebijakan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan keadilan kepada para petani, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya berbagai kendala yang menimbulkan pro dan kontra. Sebagian besar petani, terutama di Kabupaten Pemalang, mengeluhkan regulasi kebijakan ini yang dianggap terlalu rumit dan memberatkan, sehingga berujung pada rasa ketidakpuasan. Banyak petani, baik pemilik lahan maupun penggarap, merasa bahwa program ini justru tidak memberikan manfaat nyata, melainkan hanya menambah beban mereka dengan prosedur administrasi yang sulit dipenuhi. Di sisi lain, kebijakan ini dinilai lebih menguntungkan aktor-aktor kepentingan, termasuk perumus dan pelaksana kebijakan, dibandingkan petani yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.

Dalam konteks elektabilitas Ganjar Pranowo, kebijakan kartu tani ini telah memunculkan persepsi negatif di kalangan petani, yang merasa bahwa program ini sekadar "janji manis" saat kampanye dan tidak sepenuhnya terealisasi dengan baik di lapangan. Sehingga, atas elektabilitas Ganjar Pranowo yang semula mengalami peningkatan atas dukungan petani, kemudian elektabilitas tersebut menurun seiringan dengan persepsi petani terhadap Ganjar Pranowo.

Selain itu, proses pembuatan kartu hingga penggunaan kartu tani yang dianggap rumit oleh sebagian petani, sehingga kebijakan ini tidak hanya gagal memenuhi harapan sebagian besar petani, tetapi juga menciptakan persepsi ganda antara pihak pemerintah dan masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Pemalang, mengenai efektivitas dan keberpihakan program kartu tani ini. Hal tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk memastikan kebijakan ini benar-benar berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya dan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi petani di Jawa Tengah.

